

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Meningkatkan sebuah tuntutan yang berkaitan dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan baik (*good governance government*) merupakan hal yang mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Menurut (Mardiasmo,2006) Akuntabilitas dalam arti luas diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas dalam institusi pemerintahan dapat didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan sebuah jawaban kepada suatu otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Wakhyudi,2011). Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan (Abdul 2012:20).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Alifah,2014) .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Kota Bandung sebagai salah satu kota yang maju di wilayah Indonesia mempunyai berbagai prestasi yang cukup membanggakan di bidang Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah , diperlukan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Berdasarkan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Adapun laporan keuangan adalah *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi. Oleh karena itu laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban (*accountability*) dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu saat tertentu, sedangkan aktivitas operasi dilaporkan untuk suatu periode tertentu.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar yang diwajibkan tepat waktu dengan disusun mengikut Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan keuangan yang telah disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan berupa Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Berikut ini opini BPK yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kota Bandung.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung**  
**Tahun 2014-2018**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Opini BPK</b>
1	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

**Sumber: IHPS I BPK Kota Bandung ,2018**

Berdasarkan tabel 1.1 dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini yang Wajar Dengan Pengendalian (WDP). Pada umumnya penurunan opini yang disebabkan entitas tidak menerapkan SAP seperti tahun sebelumnya. Ketidaksiesuaian dengan SAP tersebut antara lain meliputi penyajian aset dan belanja yang tidak didukung dengan bukti. Pengecualian akun atas LKPD Kota Bandung masih terdapat di piutang dan aset lainnya (IHPS I BPK RI,2016).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam dasar untuk sebuah pengambilan keputusan. Adapun informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus sesuai dengan kebutuhan para pemakai serta bermanfaat bagi pemakai lainnya. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai, informasi itu akan bermanfaat jika dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan sebuah informasi yang disajikan dalam beberapa laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Pelaporan keuangan meliputi segala hal- hal aspek yang berkaitan dengan suatu penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek yang berkaitan tersebut seperti lembaga yang terlihat , seperti penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk yang disebut PABU ( Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Laporan keuangan pemerintah pusat disingkat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Seperti contoh, yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang mencatat kerugian negara pada tahun 2015 sebesar Rp. 3,86 triliun akibat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah menjalankan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi atas 398 LKPD, terdapat 4.179 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan atas sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Berikut ini sebagaimana disajikan dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2018

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (juta Rp)
1.	Kerugian Daerah	1.346	309.837,38
2.	Potensi Keuangan Daerah	377	2.453.148,99
3.	Kekurangan Penerimaan	985	587.879,36
4.	Administrasi	2.785	-
5.	Ketidakhematn/Pemborosan	255	73.632,05
6.	Ketidakefektifan	398	432.548,86
	<b>Jumlah</b>	<b>6.146</b>	<b>3.856.046,64</b>

Sumber: BPK RI

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2018, dinyatakan bahwa terhadap 398 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 18 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 295 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 50 entitas dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 50 entitas. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Menurut **Suwardjono(2012)**, Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyampaian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang harus disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Informasi yang tercantum di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang sudah disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan tersebut. Adapun karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan pemerintah yang pada dasarnya prasyarat normatif sebagaimana sudah disebutkan dalam Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) sebagai berikut:

1. Relevan, yang relevan memiliki unsur –unsur berikut:
  - a. Manfaat umpan balik (Feedback value).
  - b. Manfaat prediktif (predictive value).
  - c. Tepat waktu (timeliness).
  - d. Lengkap.
2. Andal, yang memenuhi karakteristik berikut ini:
  - a. Penyajian secara jujur.
  - b. Dapat diverifikasi (verifiability).
  - c. Netralitas.
3. Dapat dibandingkan.
4. Dapat dipahami.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan sebuah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Akutansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di sebuah bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal,2010).



Secara garis besar, Pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Arti penting sumber daya manusia bermula pada kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada pada perusahaan (Ikhsan,2008).

Temuan yang telah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah masih belum memadai. Kualitas sumber daya manusia yang minim memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang sangat mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan sebuah teknologi informasi.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami yang akan dikerjakan dengan baik sesuai dengan bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Sujana, & Sinarwati,2014).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, serta menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan adanya sebuah kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat serta adanya potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak

untuk mengakses, mengelola, dan mempergunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Pemanfaatan teknologi adalah suatu perilaku untuk menggunakan teknologi informasi yang bertujuan menyelesaikan, mengolah, menyimpan, memproses, melindungi, dan memperoleh informasi secara aman sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi informasi mempunyai manfaat antara lain kecepatan sebuah pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah yang cukup besar, biaya pemrosesan yang cukup rendah, dan kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer, 2008). Secara tidak langsung pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila teknologi informasi tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi akan terbuang sia-sia dan harga semakin mahal.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan memiliki sebuah peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan *fraud* dan melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia, 2010). Pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012, yang bermaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan dalam menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal akan diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang sangat wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Beberapa penelitian berkaitan dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dilakukan Dita Arfianti (2011) Jenny Morasa (2017) Fariziah Choirunisah (2008), Zetra (2009), Celvina Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dengan hasil yang berbeda. Dita Arfianti (2011) membuktikan bahwa realisasi laporan keuangan daerah tidak mempengaruhi terhadap nilai informasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jenny Morasa (2017), Panji Febryawan, (2017) membuktikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Zetra (2009) menunjukan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih sangat kurang. Celvina Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan.

Penelitian mengenai Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang pernah dilakukan diantaranya pernah dilakukan oleh , Panji Febryawan, (2017) yang membuktikan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi keuangan di Kota Bandung diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun klasifikasinya, sedangkan dari sisi kualifikasinya sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Adapun uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi yang ada masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Penelitian ini merupakan lanjutan yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, dan para penelitian ini akan diteliti nilai informasi pelaporan keuangan daerah, kualitas didalam sumber daya manusia, pemanfaatan sebuah teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah Kota Bandung. Permasalahan diatas menunjukkan bahwa untuk menghasilkan nilai informasi dalam laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, dibutuhkan peningkatan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan pengimplementasian pemerintah yang bersih atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Dengan adanya SPI dan *Good Governance* diharapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di setiap LKPD dapat dilakukan dengan pengawasan efektif dan penyimpangan untuk menghindari adanya penyimpangan.

Perbedaan hasil penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung”** .

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan tersebut dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah masih belum memadai atau sangat minim terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Sistem informasi keuangan daerah masih sangat lemah tetapi pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu , apabila teknologi informasi tidak/ belum mampu dimanfaatkan secara optimal implementasi teknologi akan terbuang sia -sia dan berdampak semakin mahal.
3. Penetapan adanya SPI dan *Good Governance* diharapkan penyusunannya serta penyajian di setiap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dilakukan dengan pengawasan efektif dan penyimpangan untuk menghindari adanya penyimpangan.
4. Adapun laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan yaitu ketepatanwaktuan. Mengingat ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bandung?
2. Bagaimana Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bandung?

3. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bandung?
4. Bagaimana Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bandung ?
5. Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah baik secara Parsial maupun Simultan?

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern , Pengawasan keuangan daerah serta nilai-nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui besarnya Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui besarnya Pengawasan Keuangan Daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.



5. Untuk mengetahui besarnya Kualitas sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan Daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun simultan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat mengevaluasi untuk penelitian selanjutnya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan kebijakan dalam membuat suatu pengambilan keputusan tentang menganalisis suatu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis.
- b. Sebagai suatu pengalaman yang berharga, karena dengan penelitian ini peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai bagaimana teori -teori yang sudah ada.
- c. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas publik.
- d. Bagi para akademisi  
Memberikan kontribusi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya bagi akademisi dan pertimbangan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.
- e. Bagi pemerintah daerah Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai wawasan tentang pengaruh SDM, SPI dan faktor intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## 1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 1.6.1 Landasan Teori

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola sebuah pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu sebuah pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang berkemungkinan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Teori keagenan muncul ketika bereksekutif cenderung memaksimalkan *self-interest* nya dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini baik, selain itu untuk mengamankan suatu posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori ini juga mengatakan bahwa agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai sebuah resiko.

Kualitas Sumber daya manusia (SDM) merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan sebuah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* akan lebih tinggi memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi. Menurut Hasibuan dalam R. Supomo dan Eti Nurhayati (2018:6) mendefinisikan Sumber daya manusia adalah Suatu ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”.

(Widodo,2001 dalam Kharis ,2012) Mengungkapkan tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai eksekutif tidak berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar serta mereka mampu membuka akses suatu pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah merupakan agen tetapi harus menghindari resiko ketiakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah berusaha untuk menunjukkan sebuah kinerja mereka yang selama ini baik serta akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informai menurut Eko Indrajirat (2011:2) adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data/informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu”. Nilai Informasi bisa diartikan sebagai makna atau informasi yang memiliki arti penting dan manfaat yang relatif untuk membuat suatu keputusan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Nilai informasi secara nyata memiliki karakteristik khusus terhadap tingkat ukuran, kebutuhan, dinamika, kemanfaatan dan keterpakaian informasi itu sendiri. Namun, nilai tersebut tidak dapat diukur secara nyata.

Adapun informasi yang didapatkan dari sistem informasi (*information system*) yaitu sebuah sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan bertransaksi dalam mendukung operasional baik yang bersifat manajerial maupun berupa kegiatan strategi yang mampu menyediakan laporan- laporan berupa informasi kegiatan kepada pihak yang berkepentingan.

Sistem Teknologi Informasi menurut O'Brien (2010:28) adalah Teknologi Informasi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Adapun Teknologi Informasi adalah suatu gabungan dari teknologi komputasi dan komunikasi yang terbentuk sistem dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Didalam Sistem Pengendalian Intern ini yang mungkin dapat mempengaruhi Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem sebuah pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

**“Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan memiliki sebuah peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan fraud dan melindungi sumber daya organisasi”**Bahwa pengendalian intern merupakan proses yang telah dirancang untuk memberikan keyakinan yang mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang- undangan. ” (Wikipedia,2019).

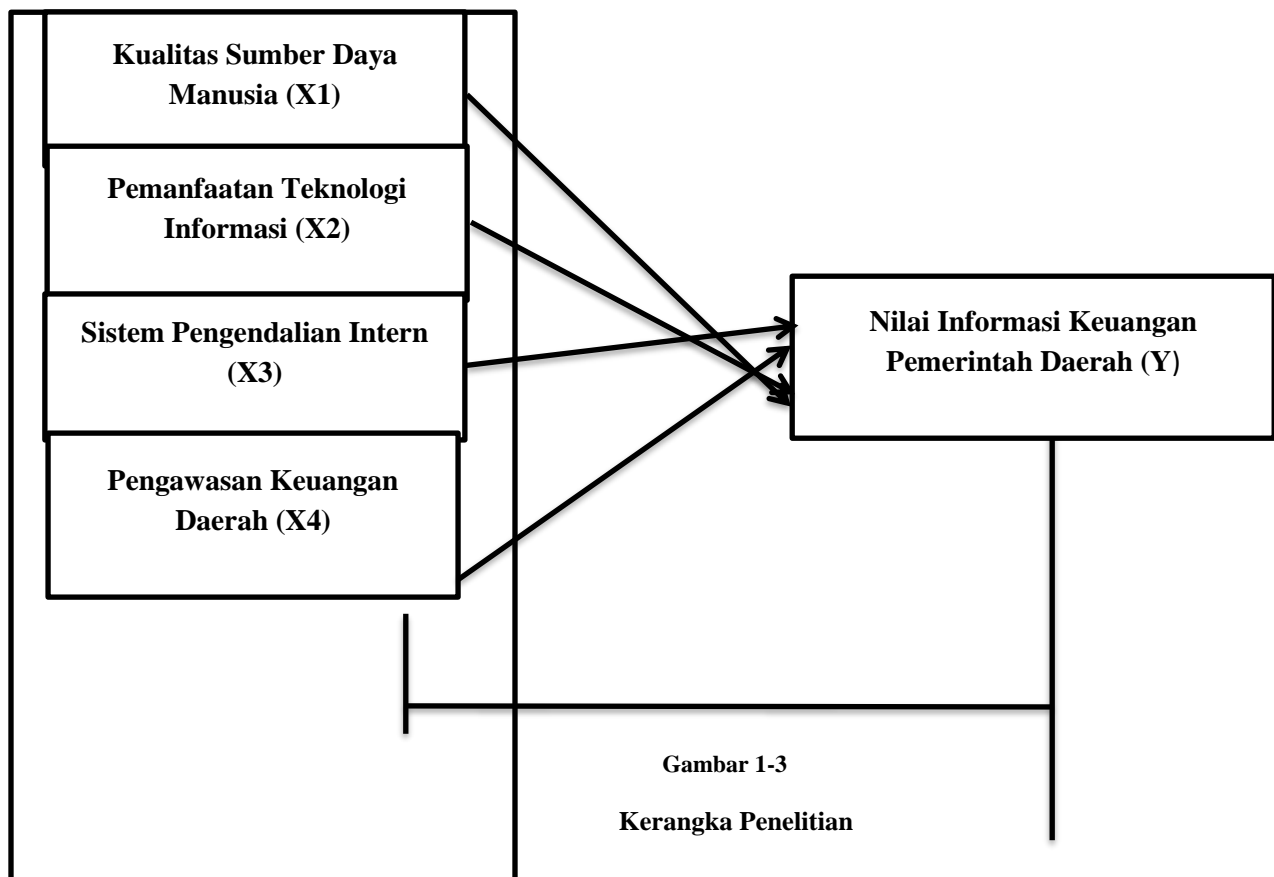
Pengawasan Keuangan Daerah terhadap sistem pengendalian intern juga akan diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Untuk dapat mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus -menerus (*series of actions and on going basis*). Selain itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*). Adapun definisi Pengawasan Keuangan Daerah adalah Segala kegiatan –kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan didalam Anggaran”.

Nilai Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan.

Adapun laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip -prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada akhirnya akan digunakan oleh beberapa kepentingan sebagaian dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu

pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Maka, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Sukmaningrum,2012

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori sebagai deskripsi alur pemikiran yang melandasi penelitian ini yang akan diteliti seperti gambar berikut :



Keterangan :

——— Garis Pemikiran

..... Area Penelitian

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu /Studi Empiris

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan hasil yang telah digunakan sebagai acuan dari peneliti didalam melakukan penelitiannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan. Selain itu, penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ada serta sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya **Tabel 1.4 Penelitian terdahulu**

No	Judul, Penelitian, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Dita Arfianti	Pengaruh Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern	Deskriptif , Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa nilai informasi memiliki kepuasan yang cukup efektif dan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dalam menganalisis nilai informasi laporan keuangan pemerintah



	(2011) (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang).			daerah. Jadi, diharapkan dapat mengetahui faktor keuangan pemerintah daerah secara akutanbel
2.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”Panji Febryawan, (2017)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) , terhadap Kualiatas Laporan Keuangan pemerintah (LKPD)	Kuantitatif, Penelitian	Hasil menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,	Pengaruh Kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian	Kualitatif, Penelitian	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan nilai laporan keuangan.

	Jenny Morasa (2017) pada BPK-AD kantor Walikota Manado,	intern, pengawasan keuangan daerah		
4.	Faktor -faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan Sistem Instansi Akuntansi Fauziah Choirunisah (2008)	Kualitas informasi laporan keuangan SAI, kemampuan SM, dukungan pimpinan dan alat fasilitas, organisasi tim, sistem pengendalian.	Kualitatif, Deskriptif	Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja.
5.	Pengaruh sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan ketepatanwaktuan	Keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi	Kuantitatif, Penelitian	Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan.  Pemanfaatan TI

	pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi, Celvina Winidyaningrum dan Rahmawati (2010)	informasi, pengendalian intern akuntansi		berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan.
--	---	--	--	---

### 1.6.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah penelitian, diidentifikasi variabel indenpenden (X) yang diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis berikut ini :

- H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

H4 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

H5 : Penerapan Kualitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pengendalian intern, dan Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan.

## **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.7.1 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, peneliti melakukan penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana No.2 Bandung, Telp : 022- 4230393, 4230097 Bandung.

### **1.7.2 Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang peneliti laksanakan data pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.